

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- ais, Chatamarasjid. 2002, *Badan Hukum Yayasan*, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, Cet., Ke-1).
- Banakar, Reza and Max Traves (editor). 2005, *Theory and Method in Socio-Legal Research: A Series published for The ONATI institute for the sociology of law* (Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing).
- Cahyono, Bangkit. Asas Pemungutan Pajak dalam Pajak Penghasilan Transaksi Saham di Bursa, (Jurnal STPI Pajak .ac.id).
- Darmawan. Agus, 2014, „Perspektif Law As An Allocative System Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan“, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2014.
- Borahima, Anwar 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia).
- Fattah. Damanhuri, 2013, „Teori Keadilan Menurut John Rawls“, *Jurnal TAPI*’s, Vol.9, No.2.
- Fauzi. Mohammad Yasir, dan Vivi Purnamawati, 2020, „Pendekatan Analysis Economic Of Law Posner Terhadap Konsep Wasiat Wajibah Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama“, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 2.
- F.C. Susila Adiyanta, *Penyanderaan Wajib Pajak (Kewenangan Fiskus dan Pertimbangan Penggunaannya untuk Penagihan Pajak)*.
- Handayati. Nur,dkk. „Pengaruh Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009“, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*.
- Irfani, Nurfaqih. Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16, No.3.
- Kansil, CST. 2009, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka).
- Manurung, Adler H., 2010, *Ekonomi Finansial*, (Jakarta: PT. ABFI Institute Perbanas).
- Mahendra,Oka, A.A. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, *Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan*, tanggal 29 Maret 2010.
- Mardiasmo, 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: CV. Andy Offset).

- Marzuki, Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group).
- Mustika, Thalia Cindyva, Dkk. Penerapan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *Banua Law Review*, Vol.3, Issue 1, April 2021.
- Nuha, Septiyawan Syaifin. Henny Juliani, Nabiatus Saadah , 2017,“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.1.
- Romli Atsasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Smith, Adam. *Wealth of Nations*, 1962, (London: J. M. Dent & Sons Ltd).
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta).
- Sumitro, Hanitijo Ronny. 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Syaukani, Imam & Thohari, A. Ahsin. 1999, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada).
- Irianto, Sulistyowati. Praktik Penelitian Hukum: Perspektif Sosiolegal, Artikel BPHN.
- Sonata. Liber Depri, 2014,“Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Sinaga. Anita, Niru, „Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Meningkatnya Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Jilid 2, Terbitan 2.
- Sugiharti, Dewi Kania. Lutfi, dkk, 2020, „Pajak Bumi dan Bangunan Yayasan Pendidikan dalam Pengembangan Pendidikan Nasional”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 1, No.2.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.
- Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Atas Objek Pajak Yang Tidak Kena Pajak yang digunakan untuk Kepentingan Umum di Bidang Pendidikan Swasta.

Peraturan Walikota Bogor Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana perubahan Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Ilmudasar. 2019, Pengertian Yayasan: Jenis, Tujuan, dan Syarat Pendirian Yayasan, diakses 24 Agustus 2021, <<https://ilmudasar.id/pengertian-yayasan/>>.

KBBI Daring, “Disharmoni”, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Disharmoni>>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021, pukul 14:18 wib.

KBBI Daring, Kebijakan, diakses 1 Desember 2021, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>>

Kamus versi online, Kota, diakses 24 Agustus 2021, <<https://kbbi.web.id/kota>>.

KBBI Daring, Pengenaan, diakses 24 Agustus 2021, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengenaan>>.

Kamus versi online. 2012, Pajak, diakses 24 Agustus 2021, <<https://kbbi.web.id/pajak>>.

Kamus versi online. Yayasan, diakses 24 Agustus 2021, <<https://kbbi.web.id/yayasan>>.

Website Bapenda Kota Bogor, <<http://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/web/>>, diakses tanggal 6 Februari 2022, pukul 15:54 wib.

<<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/component/content/article/hukum-tata-negara-perundang-undangan/harmonisasiperaturan-perundang-undangan.pdf>>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 17.00 WITA.

Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Kurnia, SE, Pengelola Yayasan Pendidikan SMK Bina Profesi pada tanggal 16 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. H. Deden Hari Rahardja, MM, Pengelola Yayasan Pendidikan SMK YKTB Bogor pada tanggal 20 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rike Ratina Ayuningsih selaku Staff Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor pada tanggal 21 Juni 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Tb.Mochamad Yusuf selaku Pengelola Yayasan Pendidikan SMK Yatek Bogor pada tanggal 22 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Pengelola Yayasan Pendidikan SMK di Kota Bogor pada tanggal 22 April 2022.